

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Pangandaran , maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengelolaan destinasi wisata melalui sistem tiket masuk, digitalisasi layanan, dan penataan kawasan, yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, masih terdapat kendala teknis dan ketidaksesuaian sistem dengan kondisi permukiman lokal yang perlu diatasi untuk optimalisasi pengelolaan.
2. Peran Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan menerapkan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan pengawasan lapangan menunjukkan peran dinas dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha dan wisatawan terhadap aturan. Namun, tantangan masih muncul terkait adaptasi digital bagi sebagian pelaku usaha dan rendahnya kepatuhan wisatawan terhadap aturan kebersihan dan larangan tertentu.
3. Promosi destinasi wisata Pantai Pangandaran dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memanfaatkan media digital, website resmi, dan kerja sama dengan travel influencer telah meningkatkan visibilitas destinasi dan jumlah kunjungan, meskipun keterbatasan anggaran masih membatasi cakupan kampanye promosi secara menyeluruh. perkembangan teknologi dan tren pemasaran pariwisata.
4. Dalam aspek Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berperan aktif Program pelatihan, pendampingan teknis, dan koordinasi dengan masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan partisipasi, kapasitas, serta

keterlibatan lokal dalam pengelolaan destinasi. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan upaya penguatan lebih lanjut.

5. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam aspek pengelolaan infrastruktur adalah dengan melakukan Pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan sarana pendukung, serta program konservasi lingkungan telah dilakukan untuk mendukung kenyamanan wisatawan dan kelestarian ekosistem. Tantangan yang ada meliputi keterbatasan sumber daya, tingginya volume pengunjung, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Pangandaran:

1. Dalam pengelolaan retribusi tiket masuk, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran disarankan untuk melakukan evaluasi sistem digitalisasi tiket masuk secara lebih komprehensif dengan melibatkan masyarakat terdampak, khususnya yang berada di kawasan permukiman sekitar. Untuk mengatasi kendala teknis dan jalur tikus, perlu adanya integrasi teknologi dengan pendekatan sosial berbasis komunitas agar sistem berjalan optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung digital dan pelatihan SDM teknis juga menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas operasional sistem.
2. Dalam aspek pengawasan, disarankan untuk membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan, tidak hanya saat momen libur panjang, dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV wisata, aplikasi pelaporan wisatawan, dan patroli terpadu.
3. Untuk memperkuat promosi, Dinas sebaiknya mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas promosi seperti kamera profesional, drone, dan perangkat dokumentasi lainnya. Perluasan kerja sama dengan lebih banyak influencer lokal dan nasional juga dapat menjadi strategi

efektif. Pengembangan platform digital resmi yang dikelola langsung oleh Dinas dapat menjadi wadah informasi terpadu serta media komunikasi interaktif antara wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

4. Dinas disarankan untuk mengembangkan model pemberdayaan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal. Pelatihan perlu dirancang lebih kontekstual dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, dialogis, dan solutif terhadap persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan LSM lokal dapat memperkuat efektivitas program serta menjembatani antara regulasi dan realitas sosial masyarakat.
5. Dinas perlu terus memperkuat sinergi dengan DLHK dan instansi teknis lain dalam pelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan zonasi kawasan wisata. Penerapan standar GSTC sebaiknya disosialisasikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan agar tercipta pemahaman dan komitmen bersama terhadap prinsip wisata berkelanjutan. Pemantauan berkala atas dampak lingkungan juga perlu diperkuat dengan publikasi hasil monitoring sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan destinasi wisata Pantai Pangandaran dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal maupun daerah secara umum.